

Katalog: 7102025.75
ISSN 2746-1289



INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI GORONTALO

Volume 7, 2023



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

Katalog: 7102025.75
ISSN 2746-1289

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI **2023** **PROVINSI GORONTALO**

Volume 7, 2023

<https://gorontalo.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

**INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
PROVINSI GORONTALO 2023
Volume 7, 2023**

Katalog : 7102025.75
ISSN : 2746-1289
Nomor Publikasi : 75000.2335
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii+40 halaman

Penyusun Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Pembuat Kover:
Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Penerbit :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Dicetak oleh :
CV. Rifaldi

Sumber Ilustrasi:
freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

TIM PENYUSUN

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI PROVINSI GORONTALO 2023 **Volume 7, 2023**

Pengarah

Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab

Nur Fajar Kurniawan, SST

Penyunting

Dewi Apriyani Hasyim, SE, Rizki Mahardika Taruna, SST

Pengolah Data

Nur Fajar Kurniawan, SST., Dewi Apriyani Hasyim, SE

Penulis Naskah

Nur Fajar Kurniawan, SST., Dewi Apriyani Hasyim, SE

Penata Letak

Rizki Mahardika Taruna, SST



KATA PENGANTAR

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2023 adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan yaitu Kota Makassar. Kota acuan dipilih dengan mempertimbangkan nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional, kelengkapan data, dan posisi kota dalam jalur perdagangan. IKK dalam publikasi ini disajikan untuk 5 kabupaten dan 1 Kota. Penghitungan IKK tahun 2023 diperoleh dari hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK) yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV 2022 serta triwulan I dan II 2023. Survei ini mengumpulkan data harga bahan atau material, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi. Penghitungan diagram timbang IKK menggunakan data dari Bill of Quantity (BoQ), Buku Analisis Harga Satuan Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). IKK Tahun 2023 merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitungan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam persiapan dan penerbitan publikasi ini. Semoga data yang disajikan dapat bermanfaat untuk semua. Tanggapan dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi pada edisi yang akan datang.

Gorontalo, Desember 2023

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Gorontalo

Mukhammad Mukhanif, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
PROVINSI GORONTALO 2023
VOLUME 7, 2023

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	6
1.3. Ruang Lingkup	6
BAB II	7
1.1 Konsep Pemikiran	7
1.2 Metode Penghitungan IKK	9
1.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.4 Penghitungan Diagram Timbang IKK	13
BAB III KONSEP DAN DEFINISI	23
BAB IV PEMBAHASAN	27
4.1. Gambaran Umum Provinsi Gorontalo	27
4.2. Dana Alokasi Umum Provinsi Gorontalo	29
4.3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Gorontalo	30
4.4. IKK Gorontalo berdasarkan kabupaten/kota	36
4.4.1 Kabupaten Boalemo	36

4.4.2Kabupaten Gorontalo	37
4.4.3Kabupaten Pohuwato.....	37
4.4.4Kabupaten Bone Bolango	38
4.4.5Kabupaten Gorontalo Utara	39
4.4.6Kota Gorontalo.....	39

<https://gorontalo.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung.....	18
Tabel 2 Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Jalan, Irigasi, dan Lainnya .	20
Tabel 3 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU), 2022.....	30
Tabel 4 IKK Tahun 2023 berdasarkan Provinsi.....	32
Tabel 5 IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023	34
Tabel 6 IKK Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2023.....	36
Tabel 7 IKK Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2023	37
Tabel 8 IKK Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023	37
Tabel 9 IKK Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019-2023	38
Tabel 10 IKK Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023	39
Tabel 11 IKK Kota Gorontalo Tahun 2019-2023.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kategori Sektor Konstruksi.....	15
Gambar 2 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	28
Gambar 3 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2023	31
Gambar 4 Indeks Kemahalan Konstruksi se-Pulau Sulawesi, 2023.....	33
Gambar 5 IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2023	35

<https://gorontalo.bps.go.id>

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) 2023

95,53
Pohuwato

97,04
Gorontalo Utara

94,81
Bone Bolango

97,34
Boalemo

96,85
Kab Gorontalo

94,38
Kota Gorontalo

100,00
Kota Makassar

83,86
Polewali Mandar

383,61
Puncak

Kota Acuan IKK 2023

Kabupaten/Kota dengan IKK tertinggi dan terendah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan otonomi daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan pemerintah sejak tanggal 1 Januari 2001 dilandasi oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dilandasi pula oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Transfer ke Daerah (TKD) salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu bentuk Transfer ke Daerah (TKD) tersebut ialah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan merupakan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21 sebagaimana telah digantikan oleh UU Nomor 1 Tahun 2022. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemerataan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, luas wilayah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut, pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain

seperti dana perimbangan yang salah satunya berupa Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemeratakan kemampuan antar daerah. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan IKK sejak tahun 2003 untuk keperluan penghitungan DAU 2003 yang kemudian dilanjutkan sampai dengan sekarang. Data IKK tersebut ditunjukkan untuk melihat tingkat perbandingan harga barang/jasa konstruksi antarwilayah dibandingkan dengan harga barang/jasa konstruksi kota acuan. Menurut *World Bank*, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang relatif beragam dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, infrastruktur diduga memegang peranan dalam penentuan harga konstruksi di Indonesia. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka diduga semakin tinggi harga konstruksi di daerah tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait data tingkat kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/ota di Provinsi Gorontalo dan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi Provinsi Gorontalo dengan provinsi lainnya.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan Penyusunan IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini mencakup seluruh kota/kabupaten se-Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

BAB II

METODOLOGI

1.1 Konsep Pemikiran

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.

Penghitungan IKK didasarkan atas suatu pendekatan atau asumsi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Metode penghitungan yang digunakan untuk membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, yaitu yang pertama dengan pendekatan harga input dan yang kedua pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*.

Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada di atas harga input tetapi di bawah harga output karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Dalam penghitungan IKK, diperlukan data/komponen penunjang yaitu paket komoditas, diagram timbang, dan data harga jenis bahan bangunan yang menjadi paket komoditas penghitungan IKK. Selain itu, ditetapkan juga suatu kabupaten/kota sebagai acuan dalam penghitungan indeksinya. Penentuan kota acuan dalam penghitungan IKK dilakukan dengan menentukan salah satu kabupaten/kota yang memiliki nilai IKK mendekati angka rata-rata seluruh kabupaten/kota se-

Indonesia. Pertimbangan penggunaan salah satu ibukota provinsi sebagai acuan dalam menghitung IKK diduga untuk memberikan fleksibilitas dalam penghitungan IKK apabila ada penambahan jumlah kabupaten/kota yang akan dihitung IKK-nya. Pada tahun 2020 digunakan Kota Semarang sebagai kota acuan.

1.2 Metode Penghitungan IKK

Penghitungan IKK 2022 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota. Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$NK_{jj} = \sum_{k=1}^n p_k \cdot q_k$$

Dengan:

NK_{jj} = Nilai komponen ke-j

p_k = Harga material/upah/sewa alat ke-k

q_k = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k

n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j

Tahapan penghitungan kedua adalah menghitung PPP system dengan menggunakan metode regresi *Country Product Dummy* (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:

$$\ln NK_{jj} = \alpha_i C_i + \beta_{jj} P_{jj} + \varepsilon$$

NK_{jj} = Nilai komponen ke-j

C_i = dummy kabupaten/kota ke-i

P_{jj} = dummy komponen ke-j dalam suatu system dan bangunan

α_i dan β_{jj} = Koefisien regresi

PPP (*Purchasing Power Parity*)_{system i} = $exp(\alpha_i)$

Tahapan penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot sistem) dengan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{banbbunan\ i} = G(PPP_{sistem\ i})^{ww2i}$$
$$i=1$$

n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan

Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PPP_{proyek\ i} = G(PPP_{banbbunan\ i})^{\frac{1}{n}}$$
$$i=1$$

n = Jumlah bangunan dalam suatu proyek

Dalam menghitung PPP system diperlukan suatu kota acuan sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata nasional, dan sebagainya.

$$C_i = \text{dummy kota acuan} = 0$$

Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK_{kab/kota} = \left(\prod_{i=1}^n (G(PPP_{proyek\ i})^{ww1i}) \right) \cdot 100$$

n = Jumlah proyek dalam kabupaten/kota

IKK 2023

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2022 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2021.

IKK tahun 2022 menggunakan data harga komoditas konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2022

menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Kota acuan pada penghitungan IKK mulai tahun 2021 adalah Kota Makassar, berubah dari Kota Semarang di tahun 2018-2020. Sebelumnya, Kota Surabaya dan Kota Samarinda pernah menjadi kota acuan pada penghitungan IKK tahun 2015-2017 dan IKK tahun 2012-2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

Pemilihan Responden

Responden Survei IKK terdiri dari: pedagang grosir yang menjual bahan bangunan dan jasa penyewaan alat berat. Data yang dikumpulkan dari pedagang grosir adalah: harga bahan bangunan, sedangkan yang diperoleh dari jasa penyewaan alat berat adalah data harga sewa alat berat dan upah jasa konstruksi. Pemilihan responden dilakukan secara purposif di seluruh kabupaten/kota.

Khusus untuk mengumpulkan data harga bahan bangunan yang diutamakan adalah pedagang grosir yang ada di wilayah bersangkutan. Jika tidak ada pedagang grosir, maka dipilih responden dengan skala prioritas yaitu: produsen, pedagang campuran (pedagang grosir sekaligus melayani eceran), baru kemudian pedagang eceran. Jumlah responden yang diambil untuk setiap kualitas barang terpilih adalah 3.

Lokasi responden Survei IKK harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Kecuali barang-barang natural seperti: pasir, batu pondasi, batu split, batu-bata, batako, dan kuesen. Pencacahan barang tersebut boleh dari produsen yang tidak berada di ibukota kabupaten/kota. Diusahakan responden sama untuk setiap periode pencacahan. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden menggunakan kuesioner VIKK2021 dan VIKK2022. Jika tidak memungkinkan dilakukan wawancara secara langsung maka kuesioner bisa ditinggal untuk diisi sendiri oleh responden. Pencacahan dilakukan pada bulan Juli 2021, Oktober 2021, Januari 2022, dan April 2022.

1.4 Penghitungan Diagram Timbang IKK

Basket of Construction Components Approach (BOCC)

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components* (BOCC). Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen

kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan.

Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity* (BOQ).

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut dikelompokkan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 Kategori Sektor Konstruksi

Gedung dan Bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
 - Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk (*reservoir*), bendung (*weir*), embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan

drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, dan waduk.

- Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
- Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
 - Bangunan jalan dan jembatan kereta.
 - Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
- Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.
 - Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
 - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
 - Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telepon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

- Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
- Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
- Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
- Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
- Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi *prefab* dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Sistem Konstruksi

Sistem menurut konsep pendekatan BOCC adalah suatu kumpulan komponen dalam suatu proyek konstruksi yang dapat menjalankan suatu fungsi tertentu. Sistem adalah struktur dalam sebuah bangunan

yang diklasifikasikan kembali kedalam kumpulan komponen bertujuan untuk mendukung bangunan seperti pondasi, atap, eksterior dan interior, dan lainnya. Sistem konstruksi pada bangunan rumah dan gedung berbeda dengan klasifikasi jenis bangunan lainnya. Berikut adalah jenis sistem untuk bangunan rumah dan gedung, dan sistem untuk klasifikasi jenis bangunan lainnya.

Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Tabel 1. Sistem Konstruksi untuk Bangunan Rumah dan Gedung

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
(1)	(2)
Site-work (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
Substructure	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban bagian bangunan yang berada di atasnya seperti balok, atap dan lainnya.
Superstructure	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini

menahan beban bagian bangunan di atasnya.

Exterior Shell/ Building Envelope Sistem yang berisi komponen konstruksi yang menyelimuti bangunan (atap). Bangunan ini memberi beban pada sistem *superstructure* pada bangunan.

Interior Partitions Sistem yang terdiri dari semua dinding, dan bagian bangunan untuk jalan keluar masuk bangunan.

Interior and Exterior Finishes Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang bertujuan untuk memperindah bangunan, misalnya pengecatan.

Mechanical and Plumbing Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang mengatur suhu, saluran air, komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan lainnya.

Electrical Sistem yang meliputi komponen konstruksi yang berhubungan dengan distribusi listrik dalam sebuah bangunan.

Sistem konstruksi untuk jenis bangunan lainnya

Sistem konstruksi untuk jenis bangunan lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sistem Konstruksi untuk Jenis Bangunan Jalan, Irigasi, dan Lainnya

Nama Sistem	Penjelasan Sistem
(1)	(2)
Site-work (Persiapan)	Sistem yang berisi komponen konstruksi yang berhubungan dengan pekerjaan persiapan dalam rangka pembangunan suatu proyek.
Substructure	Sistem yang berisi komponen struktur dan jenis pekerjaan dibawah permukaan tanah. Sistem ini menahan semua beban dari struktur/bagian bangunan yang berada di atasnya.
Superstructure	Sistem yang meliputi komponen struktur dan jenis pekerjaan diatas permukaan tanah. Sistem ini menahan beban bagian bangunan di atasnya.
Mechanical Equipment	Perlengkapan mekanik yang dipasang pada suatu bangunan seperti pompa,

turbin, pipa penghubung, tower pendingin, dan lainnya.

Electrical Equipment

Peralatan yang terpasang pada bangunan yang digunakan untuk sistem distribusi tenaga listrik, distribusi panel, pusat control pencahayaan, komunikasi dan lainnya.

Underground Utility

Jaringan bawah tanah, sistem atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi, menyimpan, transmisi dan distribusi komunikasi atau telekomunikasi, listrik, gas, minyak bumi, saluran pembuangan akhir, dan lainnya. Peralatan ini termasuk pipa, kabel, *fiber optic cable*, dan lainnya yang terpasang dibawah permukaan tanah.

Biaya masing-masing komponen disusun dari biaya per unit dari material yang digunakan dan perkiraan kuantitas dari material, koefisien dan upah tenaga kerja, koefisien dan sewa peralatan yang digunakan untuk membangun komponen tersebut. Konsep yang mendasar dari pendekatan BOCC adalah mengukur relatif harga pada level komponen konstruksi. Sebuah komponen kemudian dibagi-bagi kembali kedalam

beberapa item pekerjaan konstruksi. Komponen konstruksi dapat dianggap sebagai agregasi dari beberapa item pekerjaan konstruksi yang meliputi material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan item pekerjaan tersebut. Komponen-komponen yang digunakan dalam penghitungan diagram timbang IKK berbeda antara bangunan 1 (bangunan tempat tinggal) dan bangunan 2 (bangunan umum untuk pertanian, bangunan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bangunan umum untuk jaringan air, listrik, dan komunikasi), bangunan 3 (bangunan lainnya).

Pendekatan BOCC menggunakan 3 sistem penimbang. Macam-macam jenis penimbang tersebut adalah sebagai berikut:

1. W1 adalah penimbang yang digunakan pada level agregasi jenis bangunan seperti bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan umum untuk pertanian, jalan, jembatan, dan jaringan, dan bangunan lainnya.
2. W2 adalah penimbang untuk agregasi pada level sistem konstruksi.
3. W3 adalah penimbang untuk agregasi pada level komponen yang termasuk upah tenaga kerja dan sewa peralatan konstruksi.

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) antara lain adalah sebagai berikut:

- **Bahan bangunan/konstruksi** adalah material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan/konstruksi yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.
- **Produsen** adalah pembuat/penghasil material baik dilakukan secara manual maupun dengan bantuan peralatan/mesin.
- **Pedagang grosir** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain atau kontraktor bangunan secara grosir.
- **Pedagang campuran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada pedagang lain, kontraktor bangunan, dan rumah tangga baik secara grosir maupun eceran.
- **Pedagang eceran** adalah orang atau badan usaha yang membeli dan menjual bahan bangunan kepada rumah tangga secara eceran.
- **Bahan bangunan adalah** material yang digunakan dalam pembentukan komponen bangunan dan ditempatkan pada bagian suatu bangunan yang merupakan satu kesatuan dari bangunan tersebut.

- **Kegiatan Konstruksi** adalah suatu kegiatan meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan bangunan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi yang dimaksud dalam survei ini adalah hanya kegiatan investasi (pembangunan baru, bukan renovasi yang tidak menambah nilai aset). Hasil kegiatan konstruksi antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel, jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, serta distribusi dan bangunan jaringan komunikasi.
- **Harga sewa alat berat konstruksi** adalah harga yang terjadi ketika seseorang/organisasi/institusi menyewa alat-alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi dalam periode tertentu. Satuan/unit yang digunakan dalam harga sewa ini adalah 1 bulan atau 200 jam. Harga sewa hanya biaya sewa alat, tidak termasuk biaya mobilisasi alat dari penyewa ke lokasi proyek dan juga tidak termasuk biaya jasa operator. Umur alat berat yang disewakan juga memiliki batas maksimal yaitu 8 tahun.

- **Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)** adalah suatu indeks yang menggambarkan tingkat perbandingan harga barang konstruksi antarwilayah. Sesuai dengan pengertiannya IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk lokasi yang berbeda pada periode waktu tertentu.

<https://gorontalo.bps.go.id>

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi Gorontalo

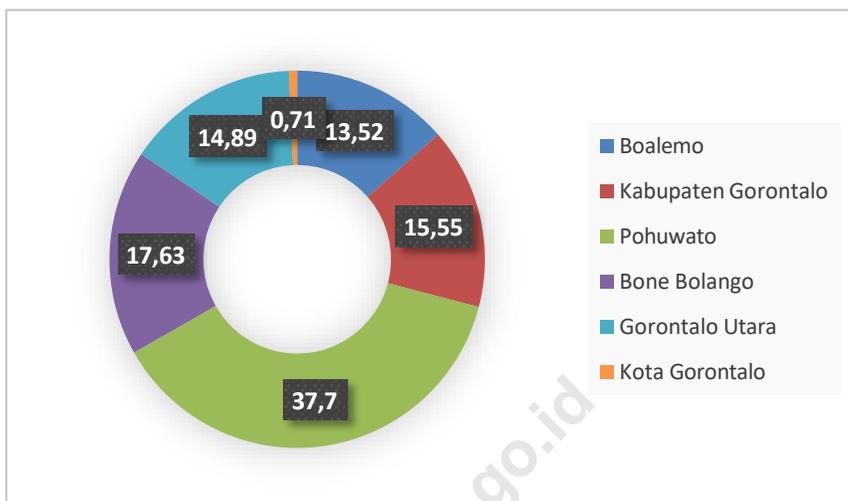
4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Gorontalo terletak di antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, luas daerah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257 km². Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,59 persen.

Secara astronomi Provinsi Gorontalo terletak antara 0° 19' – 0° 57' Lintang Utara dan 121° 23' – 125° 14' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Gorontalo adalah:

- Batas barat adalah Provinsi Sulawesi Tengah
- Batas Timur adalah Provinsi Sulawesi Utara
- Batas Utara adalah Laut Sulawesi
- Batas Selatan adalah Teluk Tomini

Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 37,7 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,71 persen.



Gambar 2 Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

4.1.2 Kondisi Transportasi

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan jembatan diperlukan demi memudahkan proses mobilisasi penduduk antar daerah dan menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa, utamanya untuk daerah-daerah sulit terjangkau. Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat yaitu sebagai penghubung antara sentra produksi dengan daerah pemasaran dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Terkait dengan besaran harga barang dan jasa pada bidang konstruksi, selain ketersediaan barang/jasa (supply), kelancaran distribusi barang/jasa (konstruksi) ke suatu wilayah diduga memiliki pengaruh. Dengan

demikian kondisi jalan menjadi salah satu syarat dalam pendistribusian barang ke suatu wilayah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan harga barang/jasa konstruksi tersebut. Data pada akhir tahun 2019 menunjukkan panjang jalan nasional di Gorontalo tercatat sepanjang 748,60 km dan jalan provinsi sepanjang 467,17 km. Dimana kondisi jalan di Provinsi Gorontalo 41,16 persen dalam kondisi baik.

Selain kondisi jalan, pembentukan harga barang/jasa konstruksi juga diduga dipengaruhi oleh jarak menuju setiap kabupaten/kota di Gorontalo. Akses barang masuk dari luar Provinsi Gorontalo melalui empat pelabuhan yaitu Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamuta, dan Pelabuhan Kota Gorontalo. Dari ketiga pelabuhan tersebut, bongkar dan muat barang paling banyak tercatat di pelabuhan Kota Gorontalo.

4.2. Dana Alokasi Umum Provinsi Gorontalo

Alokasi DAU bagi tiap daerah sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan tiap daerah. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Suatu daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. IKK merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penghitungan DAU. Besaran DAU per Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), 2022

Kabupaten/Kota	Alokasi
Boalemo	438.308.937.000
Kabupaten Gorontalo	654.839.029.000
Pohuwato	498.470.107.000
Bone Bolango	468.391.136.000
Gorontalo Utara	393.179.431.000
Kota Gorontalo	480.240.671.000

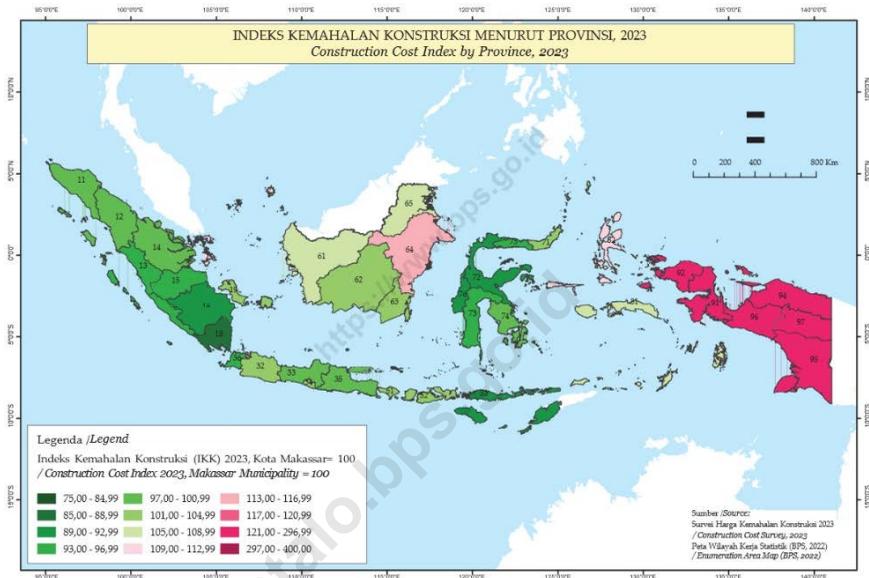
Sumber: BPKAD Provinsi Gorontalo

Kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling besar di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo dengan DAU sebesar 654,839 miliar rupiah kemudian disusul Kabupaten Pohuwato sebesar 498,4 miliar rupiah. Sedangkan kabupaten yang tercatat memperoleh DAU paling rendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara dengan DAU sebesar 393,1 miliar rupiah.

4.3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Gorontalo

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat harga/kemahalan bahan bangunan/jasa konstruksi di suatu daerah dibandingkan kota acuan. Semakin besar IKK menunjukkan semakin mahal harga bahan bangunan/konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah

diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.



Gambar 3 Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi, 2023

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebesar 95,99. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan harga barang/jasa konstruksi di wilayah Provinsi Gorontalo 4,01 persen lebih murah dibandingkan dengan kota acuan (Kota Makassar).

Tabel 4. IKK Tahun 2023 berdasarkan Provinsi

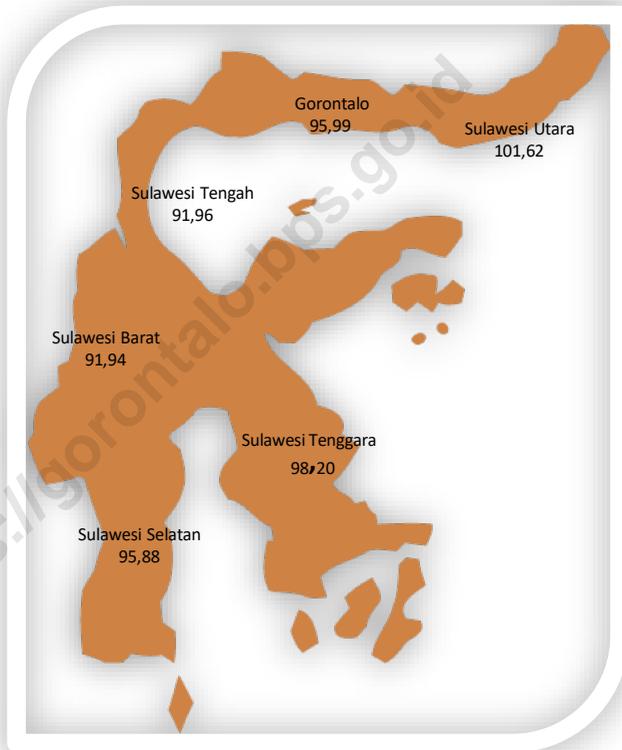
Kode	Provinsi	IKK	Kode	Provinsi	IKK
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1100	Provinsi Aceh	97,38	6100	Provinsi Kalimantan Barat	107,44
1200	Provinsi Sumatera Utara	98,81	6200	Provinsi Kalimantan Tengah	104,89
1300	Provinsi Sumatera Barat	94,15	6300	Provinsi Kalimantan Selatan	103,25
1400	Provinsi Riau	99,06	6400	Provinsi Kalimantan Timur	115,58
1500	Provinsi Jambi	93,55	6500	Provinsi Kalimantan Utara	105,21
1600	Provinsi Sumatera Selatan	91,39	7100	Provinsi Sulawesi Utara	101,62
1700	Provinsi Bengkulu	93,27	7200	Provinsi Sulawesi Tengah	91,96
1800	Provinsi Lampung	88,65	7300	Provinsi Sulawesi Selatan	95,88
1900	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	103,94	7400	Provinsi Sulawesi Tenggara	98,20
2100	Provinsi Kepulauan Riau	111,32	7500	Provinsi Gorontalo	95,99
3100	Provinsi DKI Jakarta	116,73	7600	Provinsi Sulawesi Barat	91,94
3200	Provinsi Jawa Barat	104,08	8100	Provinsi Maluku	108,12
3300	Provinsi Jawa Tengah	100,19	8200	Provinsi Maluku Utara	112,70
3400	Provinsi DI Yogyakarta	104,46	9100	Provinsi Papua Barat	124,26
3500	Provinsi Jawa Timur	98,47	9200	Provinsi Papua Barat Daya	121,87
3600	Provinsi Banten	95,74	9400	Provinsi Papua	135,56
5100	Provinsi Bali	103,40	9500	Provinsi Papua Selatan	138,42
5200	Provinsi Nusa Tenggara Barat	102,01	9600	Provinsi Papua Tengah	215,86
5300	Provinsi Nusa Tenggara Timur	92,44	9700	Provinsi Papua Pegunungan	251,25

Jika diurutkan dari nilai IKK tertinggi, dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Gorontalo menempati peringkat IKK yang ke-28. Semakin kecil ranking IKK maka semakin besar nilai IKK suatu wilayah.

Harga barang konstruksi di Provinsi Gorontalo pada umumnya tidak semahal di provinsi lain. Karena kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo semuanya ada di daratan dan tidak ada kabupaten/kota yang menyebrang ke laut, sehingga menyebabkan harga jual barang-barang di dalam Provinsi Gorontalo cenderung tidak lebih mahal dari pada provinsi lain.

Provinsi yang menempati peringkat IKK tertinggi adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan IKK sebesar 251,25 dan peringkat terendah adalah Provinsi Lampung dengan IKK sebesar 88,65.

Jika dilihat dari satu pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo menempati peringkat IKK yang ketiga dari enam provinsi di Pulau Sulawesi. Peringkat pertama tertinggi di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 101,62 dan peringkat IKK terendah di Pulau Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 91,44.



Gambar 4. Indeks Kemahalan Konstruksi se-Pulau Sulawesi, 2023

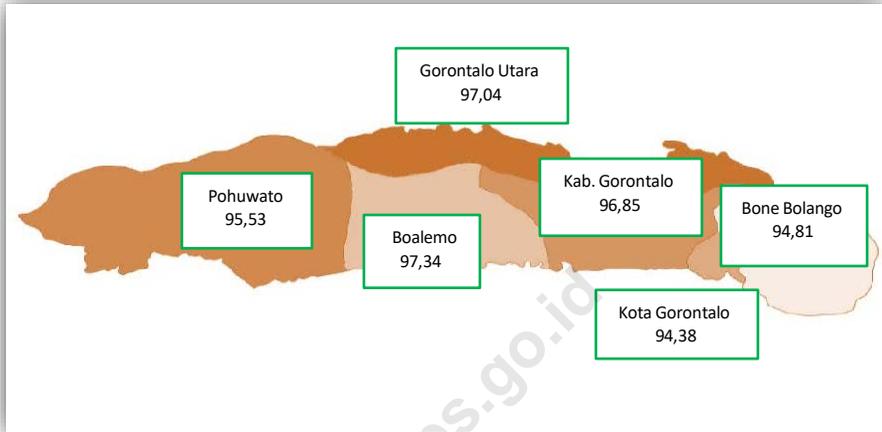
Tabel 5. IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKK Gorontalo	97,45	94,12	95,07	95,28	95,99

IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022. Hal ini menandakan biaya barang/jasa konstruksi di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 lebih mahal dibandingkan Tahun 2022.

Kenaikan harga barang/jasa konstruksi di Provinsi Gorontalo relatif lebih lambat terhadap kota acuan (Kota Makassar) dibandingkan kenaikan harga barang/jasa di wilayah lain terhadap kota acuan (Kota Makassar).

Karena merupakan indeks spasial, kenaikan atau penurunan nilai IKK tidak serta merta menunjukkan kenaikan/penurunan harga barang/jasa konstruksi di wilayah tersebut. Kenaikan IKK antar tahun hanya menunjukkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan kecepatan kenaikan harga barang/jasa konstruksi di kota acuan.



Gambar 5. IKK Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Pada Tahun 2023, IKK tertinggi terjadi di Kabupaten Boalemo sebesar 97,34 hal ini menunjukkan tingkat kemahalan barang/jasa konstruksi di Kabupaten Boalemo 2,66 persen lebih murah dari kota acuan (Kota Makassar). Dengan kata lain, jika untuk membangun sebuah gedung di Kota Makassar dibutuhkan biaya 100 milyar rupiah, maka gedung yang sama dibangun di Kabupaten Boalemo akan memerlukan biaya sebesar 97,34 milyar rupiah.

Sementara, nilai IKK yang paling rendah di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo sebesar 94,38.

4.4. IKK Gorontalo berdasarkan kabupaten/kota

4.4.1 Kabupaten Boalemo

Tabel 6. IKK Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Boalemo	102,37	97,01	97,08	99,13	97,34

IKK Kabupaten Boalemo pada Tahun 2023 adalah sebesar 97,34 dan menduduki peringkat yang pertama di Provinsi Gorontalo, artinya biaya untuk membangun suatu bangunan cenderung lebih tinggi dibanding kabupaten kota lainnya. Hal ini disebabkan karena barang-barang konstruksi di Kabupaten Boalemo tidak selengkap di kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, jadi beberapa barang langsung dibeli ke kabupaten/kota lain yang menyebabkan adanya penambahan harga transportasi.

Kabupaten Boalemo memiliki sarana pelabuhan yang dapat menjadi jalur masuk arus barang ke kabupaten ini. Akan tetapi untuk arus barang dalam jumlah besar, pada umumnya melalui jalur pelabuhan kabupaten lain yang lebih besar. Arus barang-barang konstruksi di Kabupaten Boalemo paling banyak didatangkan dari Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato.

4.4.2 Kabupaten Gorontalo

Tabel 7. IKK Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab. Gorontalo	93,81	92,67	94,84	95,84	96,85

IKK Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2023 adalah sebesar 96,85 dan menduduki peringkat ketiga di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo memiliki sarana bandara yang menjadi jalur masuk arus barang. Tetapi untuk arus barang dalam jumlah besar melalui jalur laut karena dapat memuat barang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan melalui jalur udara.

Barang-barang yang masuk ke Kabupaten Gorontalo pada umumnya didatangkan langsung dari luar Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo.

4.4.3 Kabupaten Pohuwato

Tabel 8. IKK Kabupaten Pohuwato Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pohuwato	99,94	94,33	93,86	93,81	95,53

IKK Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 adalah sebesar 95,53 dan menempati peringkat keempat Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Pohuwato memiliki sarana pelabuhan. Akan tetapi pelabuhan tersebut hanya pelabuhan penyeberangan, sehingga tidak ada arus barang yang melalui jalur laut. Sehingga arus barang yang masuk ke Kabupaten Pohuwato pada umumnya melalui jalur darat. Jalur arus barang yang masuk ke Kabupaten Pohuwato paling banyak didatangkan langsung dari luar provinsi, yaitu Kota Palu dan ada yang didatangkan dari kabupaten/kota sekitar yang dekat.

4.4.4 Kabupaten Bone Bolango

Tabel 9. IKK Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bone Bolango	97,97	94,48	95,43	94,52	94,81

IKK Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 adalah sebesar 94,81 dan menempati peringkat kelima di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki sarana pelabuhan dan bandara. Tetapi kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo sehingga arus barang yang masuk ke Kabupaten Bone Bolango melalui jalur darat.

Jalur arus barang yang masuk ke Kabupaten Bone Bolango pada umumnya didatangkan langsung dari kabupaten/kota sekitar yang dekat terutama dari Kota Gorontalo.

4.4.5 Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel 10. IKK Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gorontalo Utara	99,14	94,81	95,81	97,55	97,04

IKK Kabupaten Gorontalo Utara di Tahun 2023 adalah sebesar 97,04 dan menempati peringkat kedua di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sarana dua pelabuhan yang mendukung pergerakan arus barang yang masuk ke kabupaten ini. Pelabuhan yang memadai memudahkan pedagang untuk mendatangkan barang-barang dalam jumlah besar melalui jalur laut. Tetapi barang yang datang dari pelabuhan ini langsung dikirim di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo sehingga kebanyakan barang konstruksi yang terjual di Kabupaten Gorontalo Utara pembeliannya melalui Kota Gorontalo atau Kabupaten Gorontalo.

4.5.6 Kota Gorontalo

Tabel 11. IKK Kota Gorontalo Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Gorontalo	91,85	91,52	93,45	91,06	94,38

IKK Kota Gorontalo di Tahun 2022 adalah sebesar 94,38 dan menduduki peringkat yang keenam di Provinsi Gorontalo, yang artinya barang-barang konstruksi di Kota Gorontalo lebih murah dibandingkan barang-barang konstruksi di kabupaten lain se-Provinsi Gorontalo.

Kota Gorontalo adalah ibukota di Provinsi Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki sarana pelabuhan yang mendukung pergerakan arus barang yang masuk di Kota Gorontalo. Pelabuhan yang memadai memudahkan pedagang untuk mendatangkan barang-barang dalam jumlah besar melalui jalur laut. Arus barang di Kota Gorontalo lancar dengan didukung sarana transportasi yang cukup memadai tersebut. Barang-barang yang masuk ke Kota Gorontalo pada umumnya didatangkan dari luar Provinsi Gorontalo.



ST2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://gorontalo.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO**

Jalan Prof. Dr Aloi Saboe No. 117, Kota Gorontalo

Telp. (0435) 834596, Fax (0435) 834597

Email: gorontalo@bps.go.id

Website: <http://gorontalo.bps.go.id>

ISSN 2746-1289



9 772746 123002